

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

The Contribution Of Motor Vehicle Tax To The Increase In Local Revenue In The Talaud. Archipelago District

Reinhard Valen Ipu¹, Herman Karamoy², Wulan D. Kindangen³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.
Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : reinhardipu4@gmail.com, karamoy_herman@yahoo.com,
wulankindangen@unsrat.ac.id

Abstrak: Kontribusi adalah sebesar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan Talaud. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diolah adalah data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sampai 2019 yang didapatkan dari laporan tahunan UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan dikali 100%. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini dimana pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10,42% tahun 2018 sebesar 11,50% dan tahun 2019 sebesar 9,98% dengan rata-rata 10,58%.

Kata Kunci : Kontribusi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Abstract: contribution is as big as the influence or the participation of regional levy receipts on regional original income (PAD), it can also be said that the contribution of regional retribution is how much contribution can be contributed from regional retribution receipts to the amount of regional original income (PAD). This study aims to determine how much motor vehicle tax contributes to the increase in local revenue in the Talaud Islands Regency. The type of research used in this research is quantitative and qualitative research with a descriptive approach. The data processed is data on motor vehicle tax receipts and regional original income (PAD) from 2017 to 2019 which were obtained from the annual report of the Talaud Samsat Auxiliary UPT Agency (UPTB). The data analysis technique used in this research is to calculate the profit sharing of motor vehicle taxes and local revenue by multiplying by 100%. based on the results of data analysis conducted by researchers, it can be concluded that the results of this study where in 2017 motor vehicle taxes contributed to local revenue (PAD) by 10.42% in 2018 by 11.50% and in 2019 by 9.98% with an average of 10.58%.

Keywords: Contribution, Increasing Regional Original Income

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing-masing daerah, sejak di berlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Pendapatan asli daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah.

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahun nya selalu mengalami peningkatan menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu dari jenis pajak yang dapat memberikan sumbangsi tinggi untuk daerah. Semua itu dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar 5.558 tahun 2018 sebesar 6.104 dan tahun 2019 sebesar 6.692.

Beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain ialah kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi yang sekarang telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor juga sangat mudah. . Namun berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Talaud banyak diantara pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan BBNKB kedua, sehingga daerah Kabupaten Talaud hanya menerima populasi kendaraan saja tanpa memperoleh penerimaan pajak di tambah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor Sehingga membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berjalan dengan baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kontribusi

Menurut Anne(2012:132) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Menurut Anne(2012:132) untuk mengukur kontribusi/proporsi dan variabel digunakan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dimana } K_{vi} &= \text{Kontribusi PAD} \\ vi &= \text{Variabel Komponen APBD} \\ V_{\text{total}} &= \text{Total Variabel APBD} \end{aligned}$$

Menurut Anne(2012:132) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD).

2.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam proses pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemasukan negara terbesar berdasarkan dari sektor pajak, apapun jenisnya. Pajak dikenakan pada setiap warga negara yang telah menjadi wajib pajak, biasanya wajib pajak memiliki identitas berupa NPWP, asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan pajak.

Tujuh asas pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas Wilayah
2. Asal Kebangsaan
3. Asas Sumber
4. Asas Hukum
5. Asas Yuridis
6. Asal Ekonomis
7. Asas Finansial

2.4 Fungsi Pajak

Secara umum, pajak harus digunakan pemerintah untuk jalannya negara dan tersedianya fasilitas publik. Ada empat fungsi utama pajak:

1. Fungsi Anggaran
2. Fungsi Regulasi
3. Fungsi Distribusi
4. Fungsi Stabilitas

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi kedalam tiga sistem yaitu:

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang.

3. *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak

2.6 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013: 9) mengumumkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2.7 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut;

1. Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.8 Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan dibidang pajak daerah antara lain Uu No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

2.9 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan peralatan tehnik dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.10 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

Menurut Mulyadi (2016: 1) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Mulyadi (2016: 4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara serangan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.11 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.12 Penelitian Terdahulu

1. Margaretha Anggraini, Anton Arisman dan Christina Yunita (2016) meneliti tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Selatan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014, sedangkan variable bea balik nama kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014 daerah di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014.
2. Dinda Rezki Giovani dan Yazid Padomo (2017) meneliti tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajakkendaraan bermotor, nilai kurs rupiah terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan jumlah penduduk provinsi jawa timur.
3. Widi Winarso (2015) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Cp Dispemda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan pajak kendaraan bermotor mempunyai kontribusi sebesar 87,1% terhadap pendapatan daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono 2010:9). Menurut Poewardari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi wawancara dan observasi. Peneliti memili pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapaan asli daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud. Alamat jl. Bui Kompleks Perkantoran Pemda Talaud dan Samsat Kabupaten Talaud. Waktu penelitian dimulai sejak bulan September 2020 sampai selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data Kuantitatif dan Kualitatif, yaitu laporan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak kendaraan bermotor.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data PrimerData primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu Badan Pengelolah
2. Pajak dan Retribusi Daerah mengenai pendapatan asli daerah (PAD) dan Samsat Kabupaten Talaud mengenai pajak kendaraan bermotor.
3. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi. Contohnya: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor.

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan daa yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan sekretaris Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud. Untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti.

1. Ibu M.N Gumansalangi Kordinator Samsat Talaud
2. Bapak Lexi P. Kalungan Penetapan PKB
3. Bapak Ernes Ampa Pengelola Data

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari, dan mencatat yang sudah ad hubungannya dengan objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti sejumlah dokumen yang berhubungan dengan PKB dan PAD.

3.4 Proses Analisis Data

Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2019
2. Menganalisa laporan penerimaan PKB dan PAD terkait target anggaran dan realisasi Kabupaten Talaud Tahun 2017-2019
3. Menghitung kontribusi pajak kendaraan bermmotor terhadap pendapaan asli daerah Kabupaten Talaud
4. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud

Tabel 4.1
Objek kendaran bermotor tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Kendaran
2017	5.558
2018	6.104
2019	6.692
TOTAL 2017-2019	6.692

Sumber : UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud.

Dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas bahwa Objek kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat dimana pada tahun 2016 sebanyak 4897 buah tahun 2017 sebanyak 661 buah tahun 2018 sebanyak

546 buah dan pada tahun 2019 sebanyak 588 buah. Disini bisa dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
2017	3.851.033.050	6.338.605.221
2018	3.342.207.685	5.873.458.821
2019	3.390.054.477	15.545.206.794

Sumber : UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud

Dapat dilihat diatas pada tabel 4.2 berdasarkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dikantor Kantor UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penerimaan sebesar Rp. 3.851.003.050, tahun 2018 sebesar Rp. 3.342.207.685 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.390.054.477.

Tabel 4.3
Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persen %
2017	158.736.717.741	183.255.395.345	115,45%
2018	189.361.823.961	184.985.783.083	97,69%
2019	198.479.075.420	236.917.247.056	119,37%

Sumber : UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud

Berdasarkan tabel 4.3 diatas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2017 sebesar Rp.183.255.395.345 dengan selisih pada tahun 2018 sebesar Rp 4.702.687.093. Pada Tahun 2018 penerimaannya sebesar Rp. 184.985.783.083. Pada tahun 2019 penerimaan yang telah diterima sebesar Rp. 236.917.247.056 dengan selisih penerimaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 37.940.809.803.

Tabel 4.4
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017-2019

Tahun	Besarnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Selisi (Rp)
2017	183.255.395.345	-
2018	184.985.783.083	4.702.687.093
2019	236.917.247.056	37.940.809.803
Total	605.158.425.482	42.643.496.896
Rata-Rata	201.719.475.160	21.321.784.448

Sumber : UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan besarnya perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kurung waktu tiga tahun terakhir. Dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2017-2019 sebesar Rp. 21.321.748.448. Pada tahun 2018 Sebesar Rp. 4.702.687.093 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 37.940.809.803. Dalam penerimaan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan selisihnya dalam kurung waktu 3 tahun selalu mengalami peningkatan. Dimana total realisasi penerimaan sebesar Rp. 605.158.425.482 dan selisihnya sebesar Rp. 42.643.496.896.

Berikut adalah perhitungan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2019 dapat dihitung sebagai berikut :

$$x = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

1. Tahun 2017 = $\frac{6.338.605.221}{183.255.395.345} \times 100\% = 10,42\%$
2. Tahun 2018 = $\frac{5.873.458.821}{184.985.783.083} \times 100\% = 11,50\%$
3. Tahun 2019 = $\frac{15.545.206.794}{236.917.247.056} \times 100\% = 9,98\%$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2019 dapat diketahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2019

Tahun	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pertahun %	Kriteria Kontribusi
2017	19.108.338.461	183.255.395.345	10,42%	Kurang
2018	21.288.264.972	184.985.783.083	11,50%	Kurang
2019	23.657.020.004	236.917.247.056	9,98%	Sangat Kurang
Rata-rata	21.351.207.812	201.719.475.160	10,58	Kurang

Sumber : UPT Badan (UPTB) Tahuna Samsat Pembantu Talaud

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan talaud. Dimana pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 10,42% dengan kriteria kontribusi kurang tahun 2018 sebesar 11,50% dengan kriteria kontribusi kurang dan tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang.

Berdasarkan diatas menunjukkan pajak kendaraan bermotor tidak berkontribusi terlalu besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud karena dibawah 50% dari kriteria kontribusi. Dimana penerimaan pajak yang diterima oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sehingga kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah rata-rata 2017 sampai 2018 sebesar Rp. 201.719.475160 atau dalam bentuk persennya sebesar 10,58%.

4.2 Pembahasan

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau bantuan dalam bentuk benda, tenaga, atau ide-ide pemikiran. Iuran berupa uang yang diberikan kepada suatu perkumpulan dan sebagainya, sokongan, bantuan.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah. Kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan perundang-undang untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Pajak tersebut akan diukur kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan talaud berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan talaud.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dalam pasal 94 telah memaparkan ketentuan bagi hasil pajak daerah. Ketentuan dari bagi hasil pajak tersebut akan dirinci dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur masing-masing daerah. Dalam peraturan gubernur daerah kabupaten kepulauan talaud nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi utara atas penerimaan yang berasal dari pos pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dibagikan kepada kabupaten/kota. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2017-2019?”. Dapat diketahui dengan cara melihat tabel 4.8 diatas bahwa kontribusi berdasarkan kriteria kontribusi yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2017 sampai 2019 cenderung fluktuasi. Rata-rata tingkat kontribusi tersebut sebesar 10,58% dengan kriteria kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 11,50% dan paling rendah pada tahun 2019 dengan presentase sebesar 9,98%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan talaud. Dimana pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sebesar 10,42% dengan kriteria kontribusi kurang tahun 2018 sebesar 11,50% dengan kriteria kurang dan tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang.
2. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud dari 2017-2019 sebesar 10,58%

5.2 Saran

Adapun beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain:

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTB Tahuna Samsat Pembantu Talaud memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.
2. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Talaud, kepada UPTB Tahuna Samsat Pembantu Talaud diharapkan untuk dapat meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung : Kencana
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman dan Christina Yunita. 20016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Selatan*. <http://eprints.mdp.ac.id/1848/1/Jurnal.pdf>. Di akses 17 Oktober 2017.
- Geovani, Dinda Rezki dan Yazid Yud Padmono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Rizet Akuntansi. Vol 3, No. 12.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Poerwandari, E. K. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia*. Edisi Tiga. Depok.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.

Winarso, widi. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Wilaya Provinsi Sukabumi II)*. Seminar Nasional Inovasi dan Tren. Kampus BSI Kalibang.